



KOMITMEN BERSAMA

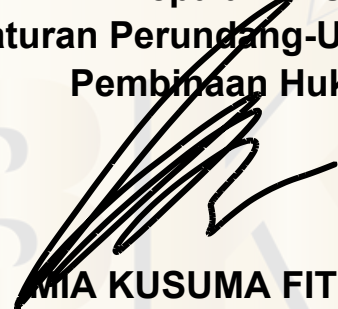
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2026

Kepala Divisi
Pelayanan Hukum



RIAN ARVIN

Kepala Divisi
Peraturan Perundang-Undangan dan
Pembinaan Hukum



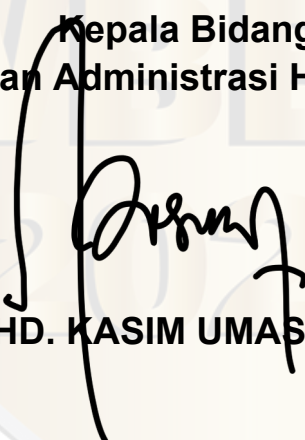
NIA KUSUMA FITRIANA

Kepala Bagian
Tata Usaha dan Umum



LA DARIANI

Kepala Bidang
Pelayanan Administrasi Hukum Umum



MUHD. KASIM UMASANGADJI

Kepala Bidang
Pelayanan Kekayaan Intelektual



ZULFIKAR GAILEA

Ternate, 19 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : La Dariani
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Maluku Utara
Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001


La Dariani
NIP. 198012312003121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	4,01 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 12.320.611.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 12.320.611.000,-

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001


La Dariani
NIP. 198012312003121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : La Dariani
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Maluku Utara Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 19 Januari 2026

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Maluku Utara

La Dariani
NIP. 198012312003121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Kusuma Fitriana
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Mia Kusuma Fitriana
NIP. 198302082009012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2.Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
2	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
4	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
5	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
6	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95.5%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 242.145.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 242.145.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp 971.328.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 23.916.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 947.412.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 947.412.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 71.014.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 71.014.000,-

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Ma Kusuma Fitriana
NIP. 198302082009012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Kusuma Fitriana
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 19 Januari 2026

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Mia Kusuma Fitriana
NIP. 198302082009012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Arvin
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Rian Arvin
NIP. 198612152005011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.2%
3	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
4	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
5	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.668.572.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp1.484.458.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.184.114.000,-

Ternate, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Rian Arvin
NIP. 198612252005011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Arvin
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 19 Januari 2026

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Maluku Utara

Rian Arvin
NIP. 198611252005011001



PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 2026

Saya, BUDI ARGAP SITUNGKIR, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ternate, 19 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Maluku Utara

BUDI ARGAP SITUNGKIR





PIAGAM KOMITMEN BERSAMA

**Pada hari ini Senin, tanggal 19, bulan Januari, tahun 2026,
saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara
berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara
Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)**

**Ternate, 19 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Maluku Utara**

BUDI ARGAP SITUNGKIR

